

STUDI PENDAHULUAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN GURU TERHADAP PELATIHAN IPS BERBASIS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL¹

Oleh: Akhmad Arif Musadad²

ABSTRAK

Akhmad Arif Musadad. 2012. *reliminary studies and Against Teacher Training Needs Analysisbased IPS Multicultural Education. Research. FKIP UNS.*

This study aimed to: (1) describe the initial conditions of teacher competence, (2) Describe the need for training teachers to improveteaching competence in multicultural education-based IPS.

The research was carried out with research and developmentapproach. Research and development is carried out in Surakarta. The subject of this study were junior high school social studies teacher, consisting of: 32 teachers as the subject of training needs, 30 teachers as a subject test instruments, six teachers as individualtest subjects, 12 teachers as a group test subjects, and 30 teachersas test subjects limited. The data in this study a qualitative and quantitative data. Qualitative data in the form of suggestions, comments from the team of experts, the answer to an openquestionnaire about the training needs of teachers, and observations are described qualitatively. Quantitative data obtainedfrom questionnaires of training needs, assessment of the expert team, and assessment of the participants to draft a model andtraining devices. Questionnaire was made in the form of Likertscale, and the results were analyzed with descriptive statisticalpercentages.

According to preliminary study results revealed: the initial conditions of social studies teacher competence is low, teachers lack an understanding of multiculturalism, teachers are not able to performthe mapping standards of competence and basic competences that have the potential of multiculturalism, the teacher is able to develop a syllabus and lesson plans based on multicultural education, andteachers are not able to implement learning IPS-based multicultural education. To enhance the competence, teachers desperately needthe implementation of multicultural education-based IPS training. membutuhkan dilaksanakannya pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural.

Kata Kunci: Kebutuhan Guru, Pelatihan, Pendidikan IPS, Pendidikan Multikultural.

¹Disarikan dari Draft Disertasi Program Doktor Manajemen Pendidikan PPs Unnes

²Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP-UNS

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini membawa konsekuensi terhadap berbagai permasalahan yang ada kaitannya dengan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan), salah satunya adalah rasialisme golongan minoritas penduduk keturunan Cina dengan mayoritas penduduk asli Indonesia. Masalah kerusuhan antar etnis, khususnya kerusuhan anti Cina merupakan masalah laten, dan nyaris terjadi di seantero tanah air. Bahkan di Surakarta telah terjadi kerusuhan anti Cina berkali-kali. Ironisnya kerusuhan Mei 1998 justru banyak melibatkan pemuda dan pelajar dalam aksi pembakaran, pengrusakan, dan penjarahan harta kekayaan milik etnis China di Surakarta (Musadad, dkk, 1999).

Kenyataan ini memberikan pukulan telak terhadap dunia pendidikan kita. Di masa lalu, sistem pendidikan nasional kita lebih bercirikan 'keseragaman' yang berlandaskan pada budaya nasional yang berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan daerah. Pendidikan yang demikian disebut pendidikan monokultural, yang menurut Dove (1983) sangat rentan terhadap konflik SARA. Suparlan (2002) menghimbau, sebaiknya pemerintah menerapkan pendidikan multikultural mulai dari tingkat SD sampai tingkat SLTA. Pendidikan multikultural sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya bisa sebagai pelajaran

ekstra-kurikuler, menjadi mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain. Dari ketiga alternatif tersebut, salah satu yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan nilai-nilai multikultural dalam mata pelajaran yang sudah ada, dan salah satunya adalah melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS).

Pembelajaran IPS tidak dapat dilepaskan dari mengajarkan nilai dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Strategi pembelajaran nilai dan sistem nilai pada IPS bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap mental yang baik. Dengan terbinanya nilai-nilai secara baik dan terarah pada mereka, sikap mentalnya juga akan menjadi positif terhadap rangsangan dari lingkungannya, sehingga tingkah laku dan tindakannya tidak menyimpang dari nilai-nilai yang luhur. Dengan demikian tingkah laku dan tindakannya selalu akan dilandasi oleh tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungannya.

Menghadapi kenyataan ini, mata pelajaran IPS memiliki tanggung jawab untuk membangun karakter bangsa atau karakter generasi muda sebagai warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Singkat kata, ada tiga tingkat karakter pembelajaran IPS di masa global ini. Pertama, secara ontologi pembelajaran IPS adalah pembelajaran mengenai proses penyadaran, pemberdayaan dan

pembudayaan nilai kepada anak didik untuk menjadi individu sekaligus warga negara. Kedua, secara epistemologi pembelajaran IPS harus mengedepankan pendekatan multikultur dan multiapproach, hal ini terkait dengan realitas kebhinekaan masyarakat dan keanekaragaman potensi anak didik (Tilaar: 2004). Ketiga, secara aksiologis pembelajaran IPS diarahkan untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik sebagai individu, masyarakat negara dan masyarakat global, atau dalam istilah formal perundangan di Indonesia yaitu menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Momon Sudarma, 2007: 27).

Berbicara masalah pembelajaran tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang guru, sebab dalam keseluruhan sistem pendidikan dan pembelajaran, peranan guru sangat strategis. Tugas guru berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling menentukan kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Dalam konteks proses belajar mengajar di kelas, peranan guru tidak dapat digantikan oleh alat-alat elektronik semodern apa pun.

Mengingat begitu pentingnya peran guru dalam peningkatan kualitas pendidikan kita, maka dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas guru-gurunya. Meskipun demikian, sampai sekarang masih terdengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang

rendahnya kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Beeby (1991: 81) mengemukakan bahwa, rata-rata guru SD sesuai keadaannya tidak lebih dari sekedar melaksanakan tugas rutin. Selanjutnya dijelaskan bahwa kritik masyarakat terhadap kualitas guru antara lain disebabkan karena kemampuan guru yang tidak memadai dalam menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam bidang pendidikan. Dewasa ini masih ada sejumlah guru yang kurang memenuhi peranannya sebagai pengembang kurikulum di sekolah, yang ditandai dengan: mereka membuat rencana pelaksanaan pembelajaran hanya sekedar formalitas, melaksanakan pembelajaran kurang profesional, melaksanakan evaluasi secara tidak kontinu, dan hasilnya tidak dijadikan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan kurikulum.

Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, dan melatih siswa baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Karena peran penting itulah maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa, nasib bangsa ini bergantung di atas pundak para guru. Apalagi dalam rangka menyongsong era pasar bebas, baik di kawasan Asia Tenggara (sejak 2003) maupun kawasan Asia Pasifik (tahun 2020), maka tuntutan akan tersedianya sumber daya manusia unggul semakin besar.

Guru memegang peran yang sangat strategis dalam setiap usaha peningkatan mutu pendidikan, seperti pembaharuan kurikulum, pengembangan metode mengajar, maupun penyediaan sarana dan prasarana hanya akan berarti jika melibatkan guru (Supriyadi, 2006: 264).

Peningkatan kompetensi guru diantaranya dapat dilakukan melalui program pengembangan dan pelatihan. Pelatihan guru adalah proses pendidikan yang terencana dan terprogram serta dilakukan dalam waktu yang lebih pendek, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan dalam menyiapkan dan memperbaiki kompetensi profesional guru dalam melaksanakan tugasnya di lapangan untuk kemajuan sekolahnya (Simamora, 2005: 342).

Atas dasar uraian di atas, maka perlu segera dilaksanakan penelitian tentang "Studi Pendahuluan dan Analisis Kebutuhan Guru Terhadap Pelatihan IPS berbasis Pendidikan Multikultural". Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kondisi awal kompetensi guru dalam pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural?
2. Apa yang menjadi kebutuhan guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran IPS berbasis

pendidikan multikultural di SMP Kota Surakarta?

Pelatihan (*training*) adalah proses sistematis pengubahan perilaku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, memiliki orientasi saat ini, dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya (Rivai, 2004: 226). Pelatihan merupakan pemerolehan pengetahuan tentang pokok persoalan oleh peserta dan mengarahkan pada tindakan perorangan, mendorong timbulnya perbaikan dalam pekerjaan (Lynton, 2002: 13). Sementara itu Nawawi (1997: 215-216) menjelaskan bahwa "pelatihan pada dasarnya berarti proses memberikan bantuan bagi para pegawai untuk menguasai ketrampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan".

Pelatihan dibedakan dengan pengembangan dalam beberapa hal. Pelatihan diarahkan untuk membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik, sedangkan pengembangan mewakili suatu investasi yang berorientasi ke depan. Pelatihan mempunyai fokus yang agak sempit dan harus memberikan ketrampilan dengan metode yang lebih mengutamakan

praktik dari pada teori. Manfaat finansial pelatihan bagi organisasi biasanya terjadi dengan segera. Sedangkan pengembangan ditujukan pada karyawan tingkat manajerial. Pengembangan mempunyai lingkup yang lebih luas, yang lebih terfokus pada kebutuhan-kebutuhan jangka panjang, yang bersifat umum. Hasilnya tidak bersifat langsung dan diukur dalam jangka panjang (Meldona, 2009: 232-233).

Lynton (2002: 13) menjelaskan bahwa ada beberapa asumsi yang mendasari konsep pelatihan guru, yaitu: (1) perolehan pengetahuan tentang pokok persoalan oleh peserta mengarah pada tindakan, (2) peserta mempelajari apa yang diajarkan oleh penatar, (3) tindakan perorangan mendorong timbulnya perbaikan dalam pekerjaan, dan (4) pelatihan merupakan tanggung jawab dari organisasi peserta, peserta itu sendiri, dan lembaga pelatihan.

Dengan demikian program pelatihan guru IPS berbasis Pendidikan Multikultural adalah proses pengembangan sumber daya manusia pendidikan (guru) yang terprogram dan terencana, yang dilaksanakan dalam waktu singkat, dan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran.

Pendidikan Ilmu Sosial atau lebih populer dengan istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris "*Social Studies*" yang telah dikembangkan di Amerika Serikat (Wahab, dkk, 2009: 1.4). Oleh karena itu gerakan dan paham *Social Studies* di Amerika Serikat banyak mempengaruhi pemikiran mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia.

Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum tersebut, IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2009: 7). Nama IPS ini sejajar dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), sebagai integrasi dari mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika.

Nursid Sumaatmadja (1984: 172) memberikan pengertian studi sosial sebagai studi mengenai interelasi ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ruang lingkup studi sosial meliputi pengkajian, penelitian, dan penyusunan

alternatif pemecahan masalah sosial dengan pengembangan kehidupannya.

Relevan dengan pengertian itu, Soemantri (2001:92) menegaskan bahwa program pendidikan IPS merupakan perpaduan dari cabang Ilmu-ilmu sosial dan humaniora termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dari Ilmu-ilmu ke-alaman dan teknologi. Dengan pengertian itu, berarti IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif untuk menyikapi dan memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia, sesuai dengan kadar kemampuan dan tingkat perkembangan peserta didik. Sebagai mata pelajaran di sekolah, mestinya IPS lebih bersifat edukatif ketimbang akademis.

Banks (2001) yang dikutip Tilaar (2004: 181) berpendapat bahwa pendidikan multikultural sebagai konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan individu, kelompok maupun negara.

Lebih jauh Banks dan Banks (1997) seperti dikutip dalam situs resmi Connecticut State Department of Education yang mengatakan bahwa pendidikan multikultural dapat didefinisikan menurut tiga hal, yaitu ide atau konsep

Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial

(*idea or concept*), gerakan reformasi (*reform movement*), dan proses berkelanjutan (*ongoing process*). Sebagai ide, pendidikan multikultural mengandung makna bahwa semua peserta didik, tanpa memperhatikan gender, status sosial, suku, rasa atau karakteristik budaya, wajib memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Sebagai gerakan reformasi, pendidikan multikultur dirancang untuk membuat perubahan di sekolah dan institusi pendidikan sehingga seluruh peserta didik dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok budaya dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar. Sebagai proses berkelanjutan, pendidikan multikultural adalah proses terus menerus diterapkan di segala aspek pendidikan di sekolah dengan tujuan persamaan hak memperoleh pendidikan dan meningkatkan prestasi akademik untuk mencapai potensi tertinggi dirinya sebagai manusia (*the highest potentials as human beings*) yang mungkin tidak pernah tercapai sempurna tapi tetap terus diupayakan.

Menurut Andersen dan Cusher (Mahfud, 2009 : 167), pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sedangkan James Banks (Mahfud, 2009: 168), mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi

perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah Tuhan/sunatullah). Kemudian, bagaimana kita mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaemin el Mahady berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (*global*) (Mahfud, 2009: 168)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan penelitian dan pengembangan (*research and development*). Model prosedural yang dipilih mengadaptasi dari model penelitian dan pengembangan Borg dan Gall. Menurut Borg dan Gall (1989), dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan (*research and development*) meliputi sepuluh langkah, yaitu: (1) penelitian dan pengumpulan data, (2) perencanaan, (3) pengembangan draft produk, (4) uji coba lapangan awal, (5) merivisi hasil uji coba, (6) uji coba lapangan, (7) penyempurnaan produk hasil uji lapangan, (8) uji pelaksanaan lapangan, (9) penyempurnaan produk akhir, dan (10) deseminasi dan implementasi.

Langkah-langkah di atas dalam penelitian selanjutnya disederhanakan

sesuai dengan kondisi dan kegunaan praktis di lapangan. Prosedur yang diikuti dalam penelitian pengembangan ini meliputi : (1) tahap studi pendahuluan, kegiatan pada tahap ini meliputi: studi literatur atau kajian pustaka, survey terhadap proses belajar mengajar di lapangan untuk mengetahui kondisi awal kompetensi guru, analisis kebutuhan guru terhadap pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural, dan pengembangan draft awal model pelatihan dan perangkatnya; dan (2) tahap pengembangan, meliputi kegiatan: validasi model dan perangkat pelatihan oleh tim pakar, revisi model dan perangkat pelatihan, uji coba perorangan, uji coba kelompok, uji lapangan terbatas, dan model final. Meskipun demikian dalam artikel ini hanya akan disampaikan sampai pada tahap studi pendahuluan.

Lokasi penelitian dan pengembangan model pelatihan dilaksanakan di Kota Surakarta, dengan populasi guru IPS sekolah menengah pertama. Subjek penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) tim pakar dan praktisi untuk memvalidasi model dan perangkat pelatihan, yakni: pakar manajemen pendidikan, pakar pendidikan IPS, dan pakar budaya; (2) guru IPS SMP, meliputi: 32 guru sebagai subjek kebutuhan pelatihan, 30 guru sebagai subjek uji coba instrumen penelitian, 6 guru sebagai subjek uji coba perorangan,

12 guru untuk uji coba kelompok, dan 30 guru sebagai subjek uji coba terbatas.

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa saran, komentar dari tim pakar terhadap model dan perangkat pelatihan, maupun jawaban angket terbuka mengenai kebutuhan pelatihan dari guru, dan hasil observasi dideskripsikan secara kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari angket kebutuhan pelatihan, penilaian tim pakar, dan penilaian peserta pelatihan terhadap draft model dan perangkat pelatihan. Angket dibuat dalam bentuk skala Likert, dan hasilnya dianalisis dengan statistik deskriptif persentase.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Kompetensi Guru

Penelitian pendahuluan dilaksanakan untuk mengetahui kondisi awal kompetensi guru IPS di SMP Kota Surakarta saat ini. Hasil dari temuan akan digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan upaya apa yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Sumber data yang diperlukan dalam studi pendahuluan ini meliputi: proses belajar mengajar IPS yang sedang berlangsung, peserta didik, kepala sekolah, guru dan RPP.

Hasil observasi terhadap pembelajaran IPS yang dilaksanakan di beberapa SMP di Kota Surakarta, secara

umum dapat disimpulkan bahwa situasi pembelajaran IPS di SMP terkesan sangat monoton, dan didominasi oleh guru. Penyajian materi dengan metode ceramah kurang memotivasi, dan peserta didik cenderung pasif. Rendahnya kualitas pembelajaran yang dikelola guru dapat diungkapkan, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut: (1) Suasana belajar tidak kondusif, hal ini terlihat dari banyaknya peserta didik yang kurang memperhatikan guru (ada yang ngantuk, ada yang bisik-bisik dengan teman semeja, ada yang menggambar/mencorat-coret kertas, dan ada yang terlihat bengong/melamun). (2) Guru menyampaikan materi dengan metode ceramah tanpa dikombinasikan dengan metode yang lain. (3) Guru hanya menjelaskan materi yang persis sama seperti yang tertulis di buku teks, tanpa ada upaya improvisasi atau pengembangan yang dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik. (4) Guru juga tidak mencoba menanamkan nilai-nilai, sikap, dan ketrampilan sosial yang relevan, yang bermanfaat dalam kehidupan peserta didik sebagai warga masyarakat dan warga negara. (5) Aktivitas belajar peserta didik rendah, hal ini tercermin dari: peserta didik pasif dalam mengikuti pelajaran, tidak ada yang bertanya, bahkan kalau ditanya tidak ada yang menjawab, kalau ditunjuk baru menjawab, dengan jawaban yang sekenanya.

Dari hasil observasi tersebut dapat dipertegas bahwa: (1) pada umumnya guru kurang mampu melaksanakan pembelajaran IPS dengan baik, karena; tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang benar, tidak mampu memotivasi peserta didik, dan mengajar hanya menyampaikan pengetahuan (*transfer of knowledge*) yang sama dengan yang tertera dalam buku pegangan tanpa ada usaha improvisasi (pengayaan) dan penanaman nilai-nilai yang diperlukan. (2) Pada umumnya guru kurang mampu menanamkan nilai-nilai multikultural yang seharusnya dapat menjadi bekal yang baik bagi peserta didik untuk hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu peneliti beranggapan perlu diadakan pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural bagi guru di SMP Kota Surakarta.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran IPS yang telah ada, peneliti kemudian menyebarkan angket kepada peserta didik.

Pada item no.1 Peserta didik menilai pembelajaran IPS yang selama ini dialami tidak menyenangkan, dengan skor rata-rata dari 36 responden sebesar 1,36. Item no. 2, apakah dalam mengajarkan materi IPS guru menanamkan nilai-nilai, sikap, dan ketrampilan social, dijawab kadang-kadang dengan skor rata-rata 1,72. Item no. 3, apakah guru anda telah mengkaitkan materi IPS dengan perspektif

budaya, agama, etnis, bahasa, dan gender secara adil dan proporsional juga dijawab kadang-kadang, dengan skor rata-rata 3,50. Item no. 4, apakah guru IPS menanamkan sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, gender, dan status sosial ekonomi terhadap peserta didik, juga dijawab kadang-kadang dengan skor rata-rata 1,81. Selanjutnya pada item no. 5, responden menilai guru IPS kurang memiliki sikap yang adil terhadap semua siswa, baik dalam proses pembelajaran, penilaian, maupun dalam interaksi di luar kelas, dengan skor rata-rata 1,89. Item no. 6, apakah dalam pembelajaran IPS selama ini anda telah merasakan mendapat kebebasan untuk mengekspresikan pendapat pribadi mengenai suatu masalah, di jawab tidak pernah dengan skor rata-rata 1,44.

Pada item no. 7, peserta didik merasa sangat perlu materi pelajaran IPS dikaitkan dengan perspektif budaya, agama, etnis, bahasa, dan gender yang berbeda-beda, dengan skor rata-rata 3,83. Item no. 8, peserta didik merasa sangat menginginkan mempelajari perbedaan dan keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, dan gender yang ada, dengan skor rata-rata 3,64. Item no. 9, peserta didik menjawab sangat setuju jika guru menerangkan materi IPS dengan memberi contoh-contoh dalam kehidupan budaya, agama, etnis, bahasa, dan gender secara bergantian, dengan skor rata-rata 3,56.

Pada item no. 10, peserta didik menjawab tidak senang jika guru selalu menjelaskan tentang budaya, agama, suku, dan bahasanya sendiri dan tidak pernah menyinggung yang lain, dengan skor rata-rata 1,47. Item no. 11, sebaliknya peserta didik juga tidak senang jika guru tidak pernah menyinggung budaya, agama, suku, dan bahasanya, dengan skor rata-rata 1,28. Item no. 12, peserta didik menjawab tidak suka jika guru menampakkan sikap negatif terhadap suku, agama, budaya, atau bahasa tertentu, dengan skor rata-rata sebesar 1,17.

Data tentang kondisi awal kompetensi guru dalam pembelajaran IPS, selanjutnya diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah/wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada saat wawancara peneliti menggunakan lembar pedoman wawancara. Hasil wawancara dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kepala sekolah menganggap bahwa proses pembelajaran IPS yang selama ini berlangsung masih perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal penyusunan silabus dan RPP, serta cara pengorganisasian materi. Kepala sekolah menilai bahwa di samping menyampaikan pengetahuan, guru IPS sangat perlu menanamkan nilai, sikap dan ketrampilan sosial kepada peserta didik. Alasannya, karena IPS tidak hanya mempelajari apa dan bagaimana pengetahuan sosial itu, tetapi peserta didik harus mampu

menerapkan pengetahuan itu dalam hidup bermasyarakat, sehingga bekal nilai-nilai dan sikap itu mampu menciptakan kehidupan sosial yang selaras dan harmonis. Kepala sekolah memandang pemahaman dan pengakuan atas perbedaan dan keberagaman yang ada di masyarakat sangat perlu ditanamkan oleh guru dalam pembelajaran IPS. Sebab pemahaman dan pengakuan atas perbedaan dan keberagaman akan menumbuhkan sikap hormat menghormati di antara peserta didik. Kepala sekolah menganggap guru kurang mampu menanamkan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran IPS, sebab selama ini guru hanya menyampaikan pengetahuan kepada siswa itu pun sebatas yang ada di buku teks. Kepala sekolah menganggap perlu diselenggarakan pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural. Alasannya agar guru memperoleh pembinaan yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensinya, khususnya dalam pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural.

Analisis RPP dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana guru telah melakukan inovasi pembelajaran. Menurut validator secara keseluruhan RPP yang digunakan guru masih perlu diperbaiki, apalagi sehubungan dengan penelitian ini yang akan mengembangkan pelatihan pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural, maka RPP perlu direvisi dalam hal: (1) Mengintegrasikan nilai-nilai

multikultural yang relevan dengan materi pelajaran IPS; (2) menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang mendukung penguasaan kompetensi IPS dan pendidikan multikultural; (3) Langkah-langkah pembelajaran /kegiatan guru pada tahap eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi harus mencerminkan pendekatan dan metode yang dipilih. Demikian juga dalam evaluasi perlu diperhatikan aspek afektif apalagi berkaitan dengan integrasi nilai-nilai multikultural.

Dari data-data yang telah dikumpulkan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kompetensi guru SMP di Kota Surakarta dalam pembelajaran IPS kurang baik, hal ini terrefleksi dari: guru kurang mampu menyiapkan rencana pembelajaran (silabus, dan RPP) dan; guru kurang mampu melaksanakan pembelajaran IPS. Untuk lebih mendalami data yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya peneliti menggali data dari guru IPS.

Pada umumnya guru mengakui bahwa pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural di SMP Kota Surakarta termasuk jarang dilakukan. Secara terperinci dari tujuh item yang telah dijawab oleh 32 responden adalah sebagai berikut: (1) guru merasa jarang memiliki sikap yang positif terhadap perbedaan dan keberagaman dilihat dari perspektif gender, budaya, bahasa, agama, dan suku; (2) guru merasa jarang

Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial

mengkaitkan masalah gender, budaya, bahasa, agama, dan suku dalam menyampaikan suatu topik tertentu dalam pelajaran IPS; (3) guru bahkan merasa tidak pernah menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan/ teori dibangun dengan mengkaitkan perspektif budaya, agama, bahasa, suku dan lain-lainnya; (4) guru juga merasa tidak pernah meluruskan sikap negatif terhadap ras, gender, budaya, suku ketika terjadi pada diri peserta didik; (5) guru merasa jarang memperlakukan semua peserta didik yang berbeda-beda suku, agama, bahasa, gender, dan budaya itu secara adil dalam proses pembelajaran, penilaian, maupun dalam interaksi di luar kelas; (6) guru juga merasa tidak pernah mengembangkan pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural itu dengan cara mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ada; dan (7) guru merasa tidak pernah memperbaiki silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sudah ada agar dapat mengkaitkan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran IPS. Guru IPS juga mengaku bahwa nilai-nilai multikultural termasuk jarang dikembangkan dalam pembelajaran IPS.

Kebutuhan Pelatihan bagi Guru IPS

Setelah diketahui kompetensi awal guru IPS masih rendah, dan ada keinginan guru untuk mengadakan pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural; maka selanjutnya peneliti mengumpulkan para

guru. Guru IPS SMP dikumpulkan di ruang kuliah Jurusan P. IPS FKIP UNS, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh bagaimana model pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural yang dibutuhkan, yang dapat digunakan untuk melatih guru sehingga

dapat meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah menengah pertama (SMP). Dari 35 guru yang diundang, 32 di antaranya hadir pada kesempatan tersebut. Mereka adalah guru IPS dari berbagai SMP (negeri, swasta berbasis agama, maupun swasta umum) di Kota Surakarta.

Hasil studi menemukan gambaran model pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural yang dibutuhkan guru, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel: Resume Rerata Aspek, Indikator dan Kategori

Aspek	Indikator	Rerata	Kategori
Bentuk Pelatihan	Prosedur Pelatihan	3,73	Sangat Penting
	Pelaksanaan Pelatihan	3,69	Sangat Penting
Rerata Aspek		3,71	Sangat Penting
Program Pelatihan	Tujuan Pelatihan	3,63	Sangat Penting
	Metode Pelatihan	3,74	Sangat Penting
	Evaluasi Pelatihan	3,67	Sangat Penting
	Target Program Pelatihan	3,78	Sangat Penting
Rerata Aspek		3,71	Sangat Penting
Bahan Ajar Pelatihan	Kualitas Bahan Ajar	3,70	Sangat Penting
	Analisis Instruksional Bahan Ajar	3,42	Penting
	Relevansi Bahan Ajar dengan Tujuan	3,78	Sangat Penting
Rerata Aspek		3,63	Sangat Penting
Instruktur Pelatihan	Penguasaan Materi	3,75	Sangat Penting
	Sistematika dan Metode	3,69	Sangat Penting
	Keluwesannya Instruktur	3,70	Sangat Penting
	Media yang Digunakan	3,75	Sangat Penting
Rerata Aspek		3,72	Sangat Penting
Sarana dan Prasarana	Peralatan Pelatihan	3,68	Sangat Penting
	Tempat Pelatihan	3,63	Sangat Penting
Rerata Aspek		3,65	Sangat Penting
Konsumsi	Kelayakan Konsumsi	3,26	Penting
Total Rerata		3,61	Sangat Penting

Berdasar tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari 32 responden (guru IPS SMP di Kota Surakarta) menilai kebutuhan pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural

sangat penting. Hal ini ditunjukkan oleh skor total rerata sebesar 3,61. Secara terperinci kebutuhan pelatihan bagi guru dapat diuraikan sebagai berikut.

Kebutuhan terhadap aspek bentuk pelatihan dinilai sangat penting, dengan skor rerata 3,71, yang meliputi indikator: (1) kebutuhan prosedur pelatihan sangat penting dengan rerata 3,73, dan (2) kebutuhan pelaksanaan pelatihan sangat penting dengan rerata 3,69.

Kebutuhan terhadap aspek program pelatihan dinilai sangat penting, dengan skor rerata 3,71, yang meliputi indikator: (1) tujuan pelatihan dinilai sangat penting dengan rerata 3,63, (2) kebutuhan metode pelatihan dinilai sangat penting dengan rerata 3,74, (3) kebutuhan evaluasi pelatihan dinilai sangat penting dengan rerata 3,67, dan (4) kebutuhan target program pelatihan juga dinilai sangat penting dengan rerata 3,78.

Kebutuhan terhadap aspek bahan ajar pelatihan dinilai sangat penting, dengan skor rerata 3,63, yang mencakup indikator: (1) kebutuhan kualitas bahan ajar dinilai sangat penting dengan rerata 3,70, (2) kebutuhan analisis instruksional bahan ajar dinilai penting dengan rerata 3,42, dan (3) kebutuhan relevansi bahan ajar dengan tujuan pelatihan dinilai sangat penting dengan rerata 3,78.

Kebutuhan terhadap aspek instruktur pelatihan dinilai sangat penting, dengan skor rerata 3,72, yang terdiri dari indikator: (1) kebutuhan penguasaan materi dinilai sangat penting dengan rerata 3,75, (2) kebutuhan sistematika dan metode dinilai sangat penting dengan rerata 3,69, (3) kebutuhan keluwesan instruktur dinilai

sangat penting dengan rerata 3,70, dan (4) kebutuhan media yang digunakan juga dinilai sangat penting dengan rerata 3,75.

Kebutuhan terhadap aspek sarana dan prasarana pelatihan dinilai sangat penting, dengan skor rerata 3,65, yang meliputi indikator: (1) kebutuhan peralatan pelatihan dinilai sangat penting dengan rerata 3,68, dan (2) kebutuhan tempat pelatihan juga dinilai sangat penting dengan rerata 3,63.

Kebutuhan terhadap aspek konsumsi pelatihan, yang meliputi indikator kelayakan konsumsi dinilai penting dengan rerata 3,26.

Pembahasan

Menurut hasil observasi, pembelajaran IPS di SMP masih jauh dari harapan. Hal ini karena pada umumnya guru hanya sekedar menyampaikan pengetahuan yang sifatnya hafalan, dan penjelasannya pun sama persis dengan yang tertera di buku pegangan. Pembelajaran yang seperti ini terasa kering, karena tidak ada bentuk pengayaan atau improvisasi dari guru. Pembelajaran yang hanya bersifat kognitif ini kurang berarti bagi peserta didik. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan peserta didik, bahwa pada umumnya pembelajaran IPS yang disampaikan oleh guru selama ini kurang memuaskan.

Apa yang dikeluhkan peserta didik di atas cukup beralasan, sebab mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat (Nursid Sumaatmaja, 1984 :20). IPS adalah pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan generalisasi dari ilmu-ilmu sosial yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, ketrampilan sosial, dan kewarganegaraan peserta didik agar dapat direfleksikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Indonesia (Depdiknas, 2006).

Di antara fungsi IPS tersebut, pada kenyataannya pembelajaran IPS sampai sekarang ini lebih banyak ditekankan pada aspek kognitif sedangkan aspek nilai dan ketrampilan sosial masih sangat kurang diperhatikan oleh guru, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam penilaian hasil belajar. Padahal kompetensi utama IPS adalah untuk membantu peserta didik menggunakan pengetahuan dan sikap agar terampil dalam hidup di masyarakat. Jadi mestinya tekanan dalam pembelajaran IPS adalah pengembangan ketrampilan siswa dalam hidup di masyarakat. Agar ketrampilan sosial ini benar-benar dimiliki oleh peserta didik, maka dalam pembelajaran IPS aspek ketrampilan sosial dibelajarkan melalui pembiasaan dan latihan yang

intensif. Untuk keperluan itu, dan sesuai dengan keadaan masyarakat yang multikultur, maka guru harus mampu memasukkan nilai-nilai multikultural sebagai muatan dalam pembelajaran IPS. Artinya, jika pembelajaran ketrampilan sosial yang bernuansa pendidikan multikultural benar-benar terinternalisasi dalam diri peserta didik, maka dapat diharapkan mereka nantinya akan menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik. Menjadi anggota masyarakat yang demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi dalam membangun masyarakat. Akhirnya juga diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah dan konflik sosial secara lebih demokratis dan bertanggung jawab.

Rendahnya kompetensi guru dalam pembelajaran IPS ini juga diakui oleh kepala sekolah SMP. Menurut mereka pada umumnya guru hanya berceramah menyampaikan materi dan kurang berinteraksi dengan peserta didik, sehingga pelajaran IPS menjadi kurang menarik. Kelemahan yang lain adalah masalah perencanaan pembelajaran, pada umumnya guru hanya foto copy silabus dan RPP dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dengan cara seperti ini berarti guru tidak memahami bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang baik. Sebab RPP itu mestinya disusun dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, yang tentunya berbeda-beda

antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.

Fakta yang terungkap dari hasil observasi, tanggapan peserta didik, dan kepala sekolah itu juga diakui oleh guru. Guru menyadari bahwa pembelajarannya selama ini lebih berorientasi pada aspek kognitif, dan kurang memperhatikan aspek afektif maupun psikomotorik, alasannya karena materi IPS yang harus disampaikan terlalu banyak sedangkan waktunya hanya sedikit. Apalagi guru juga mengaku kurang mampu untuk mengembangkan nilai-nilai yang relevan dengan materi pelajaran IPS. Guru juga menyadari bahwa masyarakat Surakarta itu sangat majemuk di lihat dari agama, etnis, budaya, maupun status sosial ekonominya. Sebagai masyarakat yang majemuk, di Surakarta diakui sering terjadi konflik antar etnis. Bahkan di kelas yang terdapat peserta didik dengan agama, dan etnis yang berbeda-beda juga kelihatan bahwa diantara mereka kurang dapat menyatu. Pada umumnya mereka lebih suka bergaul dengan teman-teman dari etnis dan agama yang sama. Karena itu guru menyadari pentingnya pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural.

Meskipun guru mengakui pentingnya pendidikan multikultural, namun mereka menyadari kurang paham dan tidak tahu bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai multikultural tersebut dalam pembelajaran IPS. Untuk itu guru sangat

berantusias untuk mengikuti pelatihan IPS berbasis pendidikan multikultural.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses belajar mengajar, angket yang berisi tanggapan dan harapan peserta didik terhadap pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural, wawancara dengan kepala sekolah, analisis RPP, dan angket kebutuhan pelatihan dari guru sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi guru dalam pembelajaran IPS masih rendah.
2. Guru tidak memahami multikulturalisme, dan tidak tahu bagaimana melaksanakan pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural.
3. Guru tidak mampu melaksanakan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS yang berpotensi multikulturalisme.
4. Guru tidak mampu mengembangkan silabus dan RPP mata pelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural.
5. Guru kurang mampu melaksanakan praktik pembelajaran IPS berbasis pendidikan multikultural.
6. Untuk meningkatkan kompetensinya, guru

membutuhkan diadakannya
pelatihan IPS berbasis pendidikan
multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, James A. and Banks, Cherry A. McGee. 1997. *Multicultural Education Issues and Perspectives*. 3rd ed. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, pp. 3-4. Dikutip oleh Connecticut State Department of Education dalam situs resmi <http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2681&p=320458> diunduh tanggal 15 Januari 2011.
- Borg, R. Walter dan Gall, Meredith D. 1989. *Educational Research: An Introduction*. Fifth Edition. Longman.
- Beeby, C.E. 1991. *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan*. (Terjemahan Ali Rachmat) Jakarta: LP3ES.
- Depdiknas. 2006. *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Media Pembelajaran*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP-Depdiknas.
- Dove, L. 1983. Curriculum Development and The New Commonwealth. *International Journal of Educational Development*, 3,2. halaman 106.
- Lynton. 2002. *Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja*. Jakarta: Karya Unipress.
- Mahfud, Choirul. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Meldona. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Perspektif Integratif*. Malang: UIN Malang Press.
- Musadad, Akhmad Arif., dkk. 1999. *Konflik Antar Etnis di Surakarta (Studi tentang: Latar Belakang, Proses, dan Dampak Kerusuhan Anti Cina Mei 1998 di Surakarta*. Penelitian FKIP – UNS.
- _____. 1997. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Jemmars.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapriya. 2009. *Pendidikan IPS, Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Simamora, H. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YPKN.
- Somantri, Nu'man, (ed. Dedi Supriadi dan Rohmat Mulyana). 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PPS, FPIPS dan Remaja Rosdakarya.
- Sudarma, Momon. 2007. "Revitalisasi IPS dalam Perspektif Global" Makalah Paralel dalam Seminar Nasional dengan tema *Revitalisasi Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Perspektif Global*. Bandung: UPI, 21 November 2007.
- Sumaatmadja, Nursid. 1984. *Metodologi Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Makalah Simposium Internasional*. Denpasar: Kajian Budaya UNUD.
- Supriyadi. 2006. *Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, HAR. 2004. *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo.
- Wahab, Abdul Aziz., dkk. 2009. *Konsep Dasar IPS*. Jakarta: Universitas Terbuka.